

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 141 TAHUN 2016 TENTANG KARTU JAKARTA PINTAR

GAN GAN GIANTIKA

Penyiaran AKOM Bina Sarana Informatika
Jl. Kayu Jati V No. 2 Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur
gan.ggt@bsi.ac.id

ABSTRAK

DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia yang menjadi cerminan bagi daerah lain dalam mengembangkan segala aspek, salah satunya pendidikan. Pemerintah melalui Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 menetapkan peraturan tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan media elektronik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa SDN Tebet Barat 01 Pagi melakukan strategi komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016. Dalam strategi komunikasi ini SDN Tebet Barat 01 Pagi melakukan strategi seperti komunikasi, sasaran, disposisi dan struktur birokrasi. Sehingga implementasi Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 dapat terwujud.

Kata Kunci: Strategi komunikasi, Implementasi, Kartu Jakarta Pintar

ABSTRACT

Jakarta is the capital city of Indonesia continues to be reflected for other regions in developing all aspects, one of which is education. The government through the Governor Decree Number 141 Year 2016 set rules on Personal Cost Assistance Education for Students From Disadvantaged Families Through Jakarta Smart Card. The purpose of this study to determine the Communication Strategy In implementing the Governor Regulation Number 141 2016 About Jakarta Smart Card in SDN 01 Pagi Tebet Barat, South Jakarta. This study used a qualitative approach. The data collection is done with the interview as the primary data. While secondary data obtained from the literature and electronic media. Based on the research that Tebet Barat SDN 01 Pagi perform communication strategies in implementing the Governor Regulation No. 141 Year 2016. In this communication strategy Tebet Barat SDN 01 Pagi perform such communication strategies, objectives, disposition and bureaucratic structure. So that the implementation of Governor Regulation Number 141 Year 2016 can be realized.

Keywords: Communication Strategies, Implementation, Jakarta Smart Card

PENDAHULUAN

Daerah khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia yang menjadi cerminan bagi daerah lain dalam mengembangkan segala aspek, salah satunya yaitu aspek pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan sumber daya manusia mampu menghadapi tuntutan perkembangan zaman yang selalu

berubah. Pendidikan yang layak, dengan demikian, tidak hanya menjadi hak istimewa kelas menengah keatas. Semua warga masyarakat dari kelompok kelas sosial mana pun dapat menikmati pelayanan pendidikan yang layak. Pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum dapat menjangkau seluruh penduduknya, karena masih banyak masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan. Salah satu penyebab belum meratanya pendidikan di Indonesia adalah

faktor kemiskinan. Pendidikan di DKI Jakarta masih jauh dari harapan. Masih banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan kemampuan orang tua untuk memenuhi biaya pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dalam pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Pasal 16 huruf (f) menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (2007) dan selanjutnya pada tahun 2012 telah dicanangkan Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional (BOP) dan Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Khusus untuk BPSM teknis penyalurannya dilakukan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Maka pemerintah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2016 menetapkan peraturan tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar adalah program beasiswa yang diberikan bagi murid tidak mampu. Seperti yang tertuang di Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2016 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (41) bahwa Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin. Siswa miskin adalah peserta didik pada

jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, dan tas sekolah, makanan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan yang termasuk kriteria program pemberian Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) bagi peserta didik

SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs/, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba, orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai, menggunakan angkutan umum, daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah, daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah, daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah, daya pemanfaatan internet rendah, tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya. Kartu Jakarta Pintar adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) minimal sampai dengan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, baik negeri maupun swasta. Program Kartu Jakarta Pintar ini diterapkan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta termasuk di SDN Tebet Barat 01 Pagi yang beralamat di jalan Tebet Barat Dalam VI Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12810. Jumlah siswa di SDN Tebet Barat 01 Pagi sebanyak 277 siswa dengan siswa yang terdaftar sebagai penerima KJP sebanyak 97 siswa. Pihak sekolah berusaha melakukan verifikasi data tiap siswa agar pemberian KJP sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2016. Pemerintah memperketat sistem penerimaan dan pencairan KJP. Pengetatan dilakukan agar Kartu Jakarta Pintar (KJP) tepat sasaran. Permasalahan yang sering muncul yaitu kurang tepatnya sasaran dalam penyaluran KJP terhadap murid, misalnya murid yang berhak mendapatkan KJP sesuai syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi tidak mendapatkan KJP, sebaliknya murid yang seharusnya tidak berhak mendapatkan KJP namun mendapatkan KJP. Demikian juga terjadi di di SDN Tebet Barat 01 Pagi. Hal

ini disebabkan karena sulitnya mengetahui latar belakang kondisi ekonomi keluarga calon penerima KJP dan seluruh orangtua murid menginginkan anaknya mendapatkan bantuan dari program Kartu Jakarta Pintar. Sedangkan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan adalah murid yang masuk dalam kriteria siswa miskin. Siswa miskin secara personal akan mendapat bantuan seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 pasal 1 ayat 43 disebutkan Biaya Personal Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan. Program Kartu Jakarta Pintar sebagai bagian dari upaya memberikan pendidikan gratis kepada warga usia sekolah di Provinsi DKI Jakarta harus mendapat dukungan. Hal ini juga yang dilakukan di SDN Tebet Barat 01 Pagi agar bantuan program Kartu Jakarta Pintar ini tepat sasaran.

KAJIAN LITERATUR

2.1. Strategi Komunikasi

2.1.1. Pengertian Strategi Komunikasi

Menurut Effendy (2000) mengenai strategi komunikasi dapat dijelaskan sebagai paduan dan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan.. Lebih lanjut Effendy (2005) menyatakan pada hakikatnya, strategi adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan melakukan berbagai aktifitas termasuk didalamnya kegiatan, pesan, dan media yang digunakan. Strategi komunikasi adalah suatu cara untuk mengatur pelaksanaan proses komunikasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Rogers (2009) mengatakan bahwa komunikasi adalah

proses dimana suatu ide di alihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Selanjutnya mengenai strategi komunikasi menurut Effendy (2000) dapat dijelaskan sebagai paduan dan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan strategi komunikasi menurut R.Wayne Pace, Brent D Peterson dan M.Dallas Burnet dalam Effendy (2002) yaitu yang pertama *adalah to secure understanding*, memastikan bahwa penerima pesan mengerti pesan yang diterimanya. Dan apabila sudah dapat mengerti dan menerima, maka yang diterima tersebut itu harus dijalin atau dibina (*to establish acceptance*). Yang pada akhirnya setelah dimengerti, kemudian dijalin atau dibina, maka selanjutnya kegiatan dimotivasikan (*to motivate action*). Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan menyeluruh komunikasi. Menyusun strategi komunikasi harus memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Berikut ini komponen komunikasi dan faktor pendukung komunikasi menurut Effendy (2002) yaitu :

1. Mengenal sasaran komunikasi
2. Faktor situasi dan kondisi
3. Pemilihan media komunikasi
4. Pengkajian tujuan pesan komunikasi
5. Peranan komunikator dalam komunikasi
6. Daya tarik sumber
7. Kredibilitas sumber

Menurut Effendy (2002) ciri-ciri komunikasi yang baik dan efektif paling tidak menimbulkan hal:a. Pengertian, yaitu penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti apa yang dimaksud oleh komunikator. b. Kesenangan, yaitu menjadikan hubungan yang hangat dan akrab serta menyenangkan. c. Mempengaruhi sikap, yaitu dapat mengubah sikap orang lain sehingga bertindak sesuai dengan kehendak komunikator tanpa merasa terpaksa. d. Hubungan sosial yang baik,

yaitu menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi. e. Tindakan, yaitu membuat komunikasi melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan stimuli. Menurut Lestari dkk (2003) Komunikan merupakan orang yang menerima pesan. Fungsinya sebagai *decoding*, yaitu orang yang menginterpretasikan, menerjemahkan dan menganalisis isi pesan yang diterimanya. Jika komunikan dapat memberikan reaksi atau umpan balik, maka akan terjadi komunikasi dua arah.. Dalam strategi komunikasi, peran komunikator sangatlah penting. Strategi haruslah bersifat dinamis, sehingga komunikator sebagai pelaksana dapat segera mengadakan perubahan jika ada suatu faktor yang mempengaruhi proses pencapaian kesuksesan. Begitupun dengan komunikan yang memiliki kemampuan dan strategi untuk melakukan perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku komunikasinya melalui daya tarik. Jika seorang komunikator menyampaikan keinginannya dengan baik dan komunikan merasa ada kesamaan tujuan, maka akan menimbulkan ketertarikan dan rasa simpatik dari komunikan kepada komunikator sebagai peran utama dari sebuah strategi komunikasi.

2.2 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi sebuah peraturan jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan yang terkait salah satunya mengenai Peraturan Gubernur Nomor 141 tahun 2016. George C. Edward III merupakan ilmuwan penganut aliran *top down*. Model *top down* berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasinya lebih berbentuk mobilisasi. Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact On Implementation* dalam Agustino (2006) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan

yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Menurut George Edward III dalam Agustino (2006) komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Faktor keempat menurut George Edward III adalah struktur birokrasi. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur (SOP)*. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan *terfragmentasi* akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 141 tahun 2016 menjadi tidak fleksibel. Sasaran dari Kartu Jakarta Pintar adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berdomisili dan bersekolah pada satuan pendidikan di DKI Jakarta.

2.3. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 merupakan peraturan yang dikeluarkan

tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal dari Sekolah Dasar minimal sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 pasal 1 ayat 27 disebutkan bahwa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta. Sekolah Dasar Negeri di DKI Jakarta salah satunya SDN Tebet Barat 01 Pagi yang beralamat di jalan Tebet Barat Dalam VI Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12810. Pada pasal 1 ayat (41) disebutkan Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria Pendataan Program Perlindungan Sosial dari Badan Pusat Statistik dan/ atau berdasarkan fakta sosial dan ekonomi yang ditemukan secara nyata di masyarakat. Mengenai biaya personal disebutkan dalam Pasal 1 ayat 43 menyatakan Biaya Personal Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan. Pasal 1 ayat (44) menyebutkan Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Personal Pendidikan. Syarat siswa yang dapat memperoleh bantuan program KJP adalah siswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (46) yaitu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sasaran siswa yang berhak tertuang dalam pasal 4 yaitu sasaran penerima Bantuan Biaya Personal pendidikan yaitu Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu yang berdomisili dan bersekolah pada satuan pendidikan di Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi*, analisis data berupa induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono : 2010). Menurut Sugiyono (2010) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini terjadi. Fokus dari penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive*/bertujuan. Cara ini dilakukan karena informan yang dipilih sebelumnya, sudah ditentukan dan informan juga benar-benar mengetahui langsung fokus permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wali kelas/guru kelas, orang Tua/wali murid, operator sekolah di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis. Sumber data dalam penelitiannya ini dapat dikelompokkan menjadi data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dengan informan secara langsung serta data sekunder berupa dokumen, buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam tiga langkah yaitu *getting in* (proses memasuki lokasi penelitian), *getting along*

(proses berada di lokasi penelitian) serta *logging the data* (proses mengumpulkan data dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi pustaka). Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain. Menurut Sugiyono (2010) analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya menurut Bungin (2006) teknik analisis domain ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran umum permasalahan suatu objek yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Penelitian kualitatif harus dapat menunjukkan data yang valid dan reliabel dengan melakukan uji keabsahan data. Gibbs dalam Creswell (2010) mengemukakan bahwa validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Dalam penelitian ini, *triangulasi* yang dianggap relevan untuk menguji keabsahan data adalah dengan melakukan *triangulasi* sumber dan teknik. *Triangulasi* teknik, berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Selain menggunakan metode *triangulasi* peneliti juga menggunakan referensi buku-buku dan akses internet.

PEMBAHASAN

Strategi komunikasi diperlukan dalam proses mengimplementasikan kebijakan peraturan Gubernur Nomor 141 tahun 2016 tentang Kartu Jakarta Pintar, agar dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Komunikasi perlu ditempatkan pada fungsinya, bukan hanya untuk membangkitkan kesadaran, memberi informasi, memengaruhi atau mengubah perilaku, melainkan komunikasi juga berfungsi untuk mendengarkan, mengeksplorasi lebih dalam, memahami, memberdayakan, dan membangun konsensus untuk perubahan, karena itu komunikasi diperlukan untuk mendukung program Kartu Jakarta Pintar ini berhasil. Strategi Komunikasi adalah paduan antara

perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya strategi komunikasi yang mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan. Dalam strategi komunikasi, peran komunikator sangatlah penting. Strategi haruslah bersifat dinamis, sehingga komunikator sebagai pelaksana dapat segera mengadakan perubahan jika ada suatu faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Begitupun dengan komunikasi yang memiliki kemampuan dan strategi untuk melakukan perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku komunikasinya melalui daya tarik. Jika seorang komunikator menyampaikan keinginannya dengan baik dan komunikasi merasa ada kesamaan tujuan, maka akan menimbulkan ketertarikan dan rasa simpatik dari komunikasi kepada komunikator sebagai peran utama dari sebuah strategi komunikasi. Menyusun strategi komunikasi harus memperhitungkan faktor-faktor pendukung. Berikut ini komponen komunikasi dan faktor pendukung komunikasi menurut Effendy (2002) yaitu :

1. Mengenal sasaran komunikasi, dalam komunikasi tentu menjadi hal penting memahami apa dan siapa yang menjadi komunikasi. Dalam hal ini komunikannya adalah para orang tua siswa SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan. Hal ini bertujuan agar para orang tua siswa mengetahui Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Para orang tua siswa diharapkan dapat memahami dan menerima mengenai syarat penerima program KJP seperti yang ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar. Dalam proses mengenal sasaran terdapat Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam diri komunikasi adalah :
 - 1). Faktor kerangka referensi Pesan komunikasi yang akan disampaikan kepada komunikasi harus disesuaikan dengan kerangka referensi. Kerangka referensi seseorang berbeda dengan orang lain. Kerangka referensi seseorang terbentuk

dalam dirinya sebagai hasil dari paduan pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita dan sebagainya.

- 2). Faktor situasi dan kondisi, yang dimaksud dengan situasi di sini adalah situasi komunikasi pada saat komunikasi akan menerima pesan yang disampaikan. Situasi yang bisa menghambat jalannya komunikasi dapat diduga sebelumnya, dapat juga datang tiba-tiba pada saat komunikasi dilancarkan. Yang dimaksud dengan kondisi di sini adalah *state of personality* komunikasi, yaitu keadaan fisik dan psikis komunikasi pada saat ia menerima pesan komunikasi
2. Pemilihan media komunikasi, media komunikasi banyak sekali jumlahnya. Namun pada umumnya media komunikasi ini dapat diklasifikasikan sebagai media tulisan atau cetakan, visual, aural, dan audio-visual. Untuk mencapai sasaran komunikasi, kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan dicapai, dan teknik yang akan dipergunakan.
3. Pengkajian tujuan pesan komunikasi
Pesan komunikasi (*message*) mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informasi, teknik persuasi, atau teknik instruksi. Namun apapun tekniknya, pertama-tama komunikasi harus mengerti pesan komunikasi itu. Pesan komunikasi terdiri atas isi pesan (*the content of the message*) dan lambang (*symbol*). Isi pesan komunikasi bisa satu, tetapi lambang yang dipergunakan bisa bermacam-macam. Lambang yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan isi komunikasi adalah bahasa, gambar, warna, kias (*gesture*), dan sebagainya.
4. Peranan komunikator dalam komunikasi.
Ada faktor penting pada diri komunikator bila ia melancarkan komunikasi, yaitu : 1) Daya tarik sumber seorang komunikator dalam hal ini Kepala Sekolah SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan, akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikasi

melalui mekanisme daya tarik jika komunikasi merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya sehingga komunikasi bersedia taat pada isi pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Kepala Sekolah akan mengimplementasikan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 kepada para orang tua siswa.

2) Kredibilitas sumber. Faktor kedua yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil adalah kepercayaan komunikasi kepada komunikator. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Berdasarkan kedua faktor di atas, seorang komunikator dalam menghadapi komunikasi harus bersikap empatik (*empathy*), yaitu kemampuan untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. (Effendy :2005). Penetapan strategi komunikasi tentu saja kembali kepada elemen dari komunikasi, yakni *who says what, to whom through what channels, and what effects*. Karena itu strategi yang dijalankan harus diawali dengan langkah-langkah mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, seleksi dan penggunaan media, sebagai berikut:

- a. Mengenal Khalayak
Mengenal khalayak adalah langkah pertama bagi komunikator dalam usaha komunikasi yang efektif. Memahami target sasaran kegiatan komunikasi merupakan hal yang sangat penting sebab semua aktivitas komunikasi diarahkan kepada mereka. Merekalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu program.
- b. Menyusun pesan
Setelah mengenal khalayak maka langkah selanjutnya dalam perumusan strategi ialah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu menarik perhatian khalayak.
- c. Menetapkan Metode
Untuk mencapai efektivitas komunikasi maka tidak hanya bergantung pada kemantapan isi pesan yang diselenggarakan dengan kondisi khalayak namun juga dipengaruhi oleh metode-metode dalam menyampaikan pesan kepada sasaran. Dalam dunia komunikasi, metode penyampaian pesan dapat dilihat dari dua aspek yaitu: menurut cara

pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya. Aspek pertama (menurut cara pelaksanaannya) dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu metode *redundancy (repetition)* dan *canalizing*. Sementara aspek yang kedua (menurut bentuk isinya) dikenal metode- metode *informatif, persuasi, edukatif dan kursif*.

d. Seleksi dan penggunaan Media

Sebelum suatu pesan atau kebijakan lembaga disampaikan kepada masyarakat perlu dipertimbangkan tentang penggunaan media atau saluran yang paling efektif. Didalam ilmu komunikasi dikenal komunikasi langsung (*face to face*) dan media massa. Jika sasarannya hanya terdiri dari beberapa orang saja dan lokasinya dapat dijangkau maka digunakan komunikasi langsung, termaksud jika sasarannya internal publik maka biasanya digunakan pertemuan-pertemuan. Jika sasarannya banyak orang dan tersebar dimana-mana, maka salurannya yang sesuai adalah media massa.

Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett dalam bukunya *Techniques for Effective Communication* seperti yang dikutip Effendy (2002) ada empat tujuan dalam strategi komunikasi sebagai berikut :

- a. *To secure understanding* yaitu untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi.
- b. *To establish acceptance* yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibina dengan baik
- c. *To motivate action* yaitu penggiat untuk memotivasinya.
- d. *To goals which communicator sought to achieve* yaitu bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi yang berlangsung tersebut.

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 141 Tentang Kartu Jakarta Pintar di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan agar tercapainya tujuan yang sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 mengenai Pemberian Biaya Bantuan Personal mengenai terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin

kepastian mendapatkan layanan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan

2. Sasaran

Pihak sekolah melakukan verifikasi data dengan sangat ketat sehingga pemberian bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tepat sasaran bagi siswa yang membutuhkan. Terlebih, pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini memang bertujuan untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Selain harus melewati seleksi ketat, beberapa persyaratan juga harus dilampirkan. Beberapa persyaratan itu di antaranya nomor induk kependudukan (NIK) yang sesuai dengan kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu (SKTM), terdaftar dalam sekolah, dan diusulkan pihak sekolah. Penerima juga harus menandatangani pakta integritas dan surat kelakuan baik.

3. Mekanisme

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 pasal 24 disebutkan Pencairan Bantuan Biaya Personal Pendidikan dilakukan secara non-tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah dan bantuan sosial. Tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pendukung personal. Dalam hal ini jelas Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud. Pada pasal 20 ayat (1) huruf a dapat berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Biaya Operasional Pendidikan dan/ atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya. Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, perlengkapan/peralatan dan atau biaya pendukung personal lainnya untuk mendukung peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk Tingkat Pendidikan Dasar dan Tingkat Pendidikan Menengah hanya dapat digunakan dan terbatas untuk pembelian alat tulis dan perlengkapan sekolah, buku pelajaran dan penunjang pelajaran, alat dan/ atau bahan praktik, seragam sekolah dan kelengkapannya. Dapat juga dibelanjakan makanan bergizi, kacamata sebagai alat bantu penglihatan, alat bantu pendengaran, kalkulator scientific, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda dan/ atau komputer/laptop. Proses pencairan dana Kartu Jakarta Pintar telah mengalami

perubahan dari yang awalnya dapat ditarik tunai kini hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/ gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP. Peraturan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan pengawasan terhadap penggunaan dana KJP agar lebih terkontrol. Selain itu dana KJP tidak dapat ditarik tunai baik di teller maupun ATM, namun dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa.

4. Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan yang ketat dari sekolah sehubungan dengan bukti pembelanjaan sebagai alat kontrol penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar. Jika ada siswa yang melanggar maka bantuan Kartu Jakarta Pintar dapat dihentikan.

5. Larangan dan Sanksi

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan peserta didik maupun orang tua namun akan ada sanksi langsung dari pihak sekolah, sanksi ini dapat berupa peringatan secara lisan saja dan penghentian program Bantuan Personal Kartu Jakarta Pintar.

Faktor-faktor pendukung Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016

1. KOMUNIKASI

Pada kebijakan Kartu Jakarta Pintar ini telah diatur di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar. Kepala Sekolah menjelaskan bahwa sasaran dari Kartu Jakarta Pintar adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berdomisili dan bersekolah pada satuan pendidikan di DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Seksi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat dan menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan

2. SUMBERDAYA

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor

141 tahun 2016 tentang Kartu Jakarta Pintar, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan agar berjalan efektif. Jumlah sumberdaya manusia di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan sebanding dengan jumlah pendaftar dan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan. Ada dua orang petugas yang menangani pendaftar dengan pembagian tugas yang jelas agar proses dapat berjalan dengan baik. Strategi komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan dapat berjalan dengan baik. Ada anggaran khusus untuk survey lokasi dan hal administratif lainnya. Sarana dan prasarana yang tersedia layak pakai dan mampu mendukung keberlangsungan program.

3. DIPOSISI

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien para implementor tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar. Pelaksana kebijakan yang di tugaskan pihak sekolah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin agar dalam mendata siswa yang berhak mendapatkan program Kartu Jakarta Pintar tepat sasaran yaitu memang siswa itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Petugas akan mendata siswa dan akan melakukan survey ke rumah-rumah tiap calon yang di daftarkan. Setelah itu akan dilakukan verifikasi data siswa yang berhak mendapatkan bantuan program Kartu Jakarta Pintar.

4. STRUKTUR BIROKRASI

Birokrasi sebagai sebuah pelaksana kebijakan implementasi harus dapat mendukung kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 141 tahun 2016 tentang Kartu Jakarta Pintar. Pihak sekolah mengetahui Petunjuk Teknis (Juknis) program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Petunjuk teknis program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar bermaksud untuk memberikan panduan agar terdapat

kesamaan pemahaman dan langkah dalam melaksanakan program yang sesuai Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016.

PENUTUP

Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) minimal sampai dengan tamat SMA atau sederajat dengan dibiayai penuh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Program Kartu Jakarta Pintar ini bertujuan untuk meningkatkan akses memperoleh pendidikan, kepastian layanan pendidikan, dan kualitas hasil pendidikan. Strategi komunikasi yang dilakukan di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan sudah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016. Selain itu implementasi Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 sudah di jelaskan dengan melalui beberapa tahap seperti melakukan komunikasi, menjelaskan sasaran, disposisi dan struktur birokrasi. Kualitas dan tenaga pendidik di SDN Tebet Barat 01 Pagi Jakarta Selatan harus lebih ditingkatkan agar kemampuan komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 tentang Kartu Jakarta Pintar lebih meningkat dari sebelumnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan komunikasi dan mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar agar baik orang tua siswa dan siswa mengetahui dan menjalaninya dengan baik sehingga tepat sasaran.

REFERENSI

Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta

Bungin, Burhan. (2006). Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Creswell, John W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Effendy, Onong Uchajana. (2000). Strategi Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

----- (2002). Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

----- (2002). Dinamika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. Ke-6

Maliki, dan Ending Lestari. (2003). Komunikasi yang Efektif: Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III, Jakarta: Lembaga Admintrasi Negara

Rogers, Everett M. (2009). Perspektif Komunikasi Efektif. Jakarta : Grafindo

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundangan:

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar

Website :

<http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-nomor-8-tahun-2006-tentang-sistem-pendidikan.pdf/>

<http://www.kjp.jakarta.go.id>

BIODATA PENULIS

Nama lengkap Gan Gan Giantika. Saya menamatkan jenjang strata satu (S1) di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP) pada tahun 2002, di Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat. Saya sangat menyukai dunia pendidikan dan ingin berkecimpung sebagai tenaga pengajar. Pada tahun 2008 saya melamar menjadi Dosen di Bina Sarana Informatika. Saat itu saya melamar sebagai dosen yang mengajar di bidang komunikasi. Sejak tahun 2008 sampai sekarang saya mengajar di Akademi Komunikasi Bina Sarana Informatika. Pada Tahun 2010 saya mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2 di jurusan Manajemen Universitas BSI Bandung dan lulus pada tahun 2012 dengan menyandang gelar Magister Manajemen.